



## BUPATI PACITAN

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se Kabupaten Pacitan  
di

PACITAN

### SURAT EDARAN Nomor : 800.1.6.2/ ||| 4 /408.54/2025

#### TENTANG IZIN PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

##### 1. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan berpengaruh positif pada kinerja ASN dan diharapkan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, termasuk dalam hal ketataan terhadap peraturan perundang-undangan dan etika kehidupan berkeluarga.

Dalam rangka pembinaan disiplin ASN khususnya perceraian ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, ASN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh **izin perceraian atau surat keterangan perceraian** dari Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## 2. Maksud dan Tujuan

Dikarenakan meningkatnya kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka diharapkan Kepala Perangkat Daerah untuk lebih selektif dalam memberikan rekomendasi/pengantar kepada Bupati, dengan terlebih dahulu dilakukan pembinaan secara maksimal yang tertuang dalam Berita Acara Pembinaan.

Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan ASN tunduk pada peraturan yang berlaku serta memastikan proses perceraian sesuai dengan hukum agar hak-hak ASN secara administrasi bisa terpenuhi.

## 3. Ruang Lingkup

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh **izin tertulis** lebih dahulu dari Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. ASN yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib melaporkan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapatkan **surat keterangan**, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah yang bersangkutan menerima gugatan perceraian.
3. ASN yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai ASN, masing-masing ASN tersebut wajib memperoleh **izin tertulis atau surat keterangan** terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Sesuai Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil angka 5.

Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yang salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina;
- b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan;

- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- i. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 116 Tahun 2023 tentang Pemerintah Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Linkup Pemerintah kabupaten Pacitan;

## 5. Isi Edaran

Adapun syarat administrasi yang harus dilengkapi ASN untuk mendapatkan izin atau surat keterangan sebagai berikut : (*contoh terlampir*)

- 1) **Sebagai Penggugat** (mendapat izin untuk melakukan perceraian) :
  - a. Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Mengajukan surat permintaan untuk melakukan perceraian;
  - c. Surat panggilan untuk dilakukan pembinaan;
  - d. Berita Acara Pembinaan (BAP) yang dilakukan oleh Atasan Langsung;
  - e. Foto copy dokumen perkawinan (Akta Nikah, Kartu Susunan Keluarga/KSK);
  - f. Foto copy dokumen kepegawaian (SK Pangkat Terakhir, Gaji Berkala terakhir dan SK Jabatan terakhir (bila menjabat);
  - g. Surat Pernyataan Persetujuan untuk melakukan Perceraian dari kedua belah pihak atau dari pihak yang tergugat;
  - h. Surat pernyataan Persetujuan dari orang tua kedua belah pihak dan atau pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami/istri kedua belah pihak (bermaterai);
  - i. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa yang dikuatkan Camat;
  - j. Berita Acara Penasehatan dari BP-4 Desa;
  - k. Berita Acara Penasehatan dari BP-4 Kecamatan;
  - l. Surat pernyataan pembagian gaji, (bermaterai).

- 2) Sebagai tergugat (mendapat surat keterangan untuk melakukan perceraian) :
- a. Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. ASN yang tergugat mengajukan Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian;
  - c. Relaas/surat panggilan dari Pengadilan Agama setempat;
  - d. Surat panggilan untuk dilakukan pembinaan;
  - e. Berita Acara Pembinaan (BAP) yang dilakukan oleh Atasan Langsung;
  - f. Foto copy dokumen kepegawaian (SK Pangkat Terakhir, Gaji Berkala terakhir dan SK Jabatan terakhir (bila menjabat);
  - g. Surat Pernyataan Persetujuan untuk melakukan Perceraian dari kedua belah pihak atau dari pihak yang tergugat;
  - h. Surat pernyataan Persetujuan dari orang tua kedua belah pihak dan atau pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami/istri kedua belah pihak (bermaterai);
  - i. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa yang dikuatkan Camat;
  - j. Berita Acara Penasehatan dari BP-4 Desa;
  - k. Berita Acara Penasehatan dari BP-4 Kecamatan;
  - l. Surat pernyataan pembagian gaji, (bermaterai).

## 6. Penutup

Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menindaklanjuti permohonan izin perceraian yang diajukan Aparatur Sipil Negara.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tanggal.....

Kepada  
Yth. Bupati Pacitan  
di  
PACITAN

**SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan/pekerjaan :  
Unit Kerja :  
Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan untuk melakukan perceraian dengan istri / suami saya :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan/pekerjaan :  
Unit Kerja :  
Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- a. ....  
b. ....  
c. ..... dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. ....  
b. ....  
c. dan seterusnya

4. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....  
NIP

Tanggal.....

Kepada  
Yth. Bupati Pacitan  
Di  
PACITAN

## SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan/pekerjaan :  
Unit Kerja :  
Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri saya :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan :  
Jabatan/pekerjaan :  
Unit Kerja :  
Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

d. Surat gugatan perceraian  
e. .....  
f. ..... dan seterusnya

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....  
NIP

**SURAT PERNYATAAN  
PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Sebagai PENGGUGAT

Menyatakan dengan sesungguhnya bersedia bercerai dengan :

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Sebagai TERGUGAT

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Pacitan,

TERGUGAT

Materai  
Rp 10.000,00

PENGGUGAT

**SURAT PERNYATAAN  
KESEPAKATAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai suami/istri sah :

Nama : .....

Umur : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami sepakat untuk melakukan perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. .....

2. .....

3. .....

4. Dan seterusnya

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Pacitan,

Tergugat  
SUAMI/ISTRI

Materai  
Rp 10.000,00

Penggugat  
SUAMI/ISTRI

**SURAT IZIN ORANG TUA/WALI  
( TERGUGAT )**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini memberikan izin kepada anak kandung saya yang bernama :

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Untuk bersedia dan sanggup menerima gugatan dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami/istrinya yang bernama:

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Demikian surat izin ni kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pacitan,

Materai  
Rp 10.000,00

Orang Tua/ Wali

**SURAT IZIN ORANG TUA/WALI  
( PENGGUGAT )**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini memberikan izin kepada anak kandung saya yang bernama :

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Untuk menggugat cerai suami/istrinya yang bernama:

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Demikian surat izin ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pacitan,

Materai  
Rp 10.000,00

Orang Tua/ Wali

**SURAT IZIN WALI/SAUDARA KANDUNG**  
( apabila orang tua sudah tidak ada )

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (saudara/kakak kandung)  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan izin kepada anak saya (saudara kandung saya) a.n ..... untuk mengajukan gugatan perceraian atas suami/istri a.n ..... demi ketentraman hati dan ketenangan hidup. (contoh) Mengingat banyaknya persoalan/percekcokan/perselisihan terus-menerus yang telah terjadi sehingga anak saya meninggalkan rumah selama ... tahun hingga tidak menemukan jalan keluar untuk berdamai kembali.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan semestinya.

Pacitan,  
Hormat saya

Materai Rp 10.000,00

.....

## SURAT IZIN MENYETUJUI PERCERAIAN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

Umur

Agama

Pekerjaan

Alamat

2. Nama

Umur

Agama

Pekerjaan

Alamat

Merupakan putra/putri dari bapak ..... dan ibu ....., dengan ini menyatakan bahwa kami menyetujui perceraian yang telah diajukan oleh kedua orang tua kami.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan semestinya.

Pacitan,

Hormat saya

Materai Rp 10.000,00

.....ANAK.....

SURAT KETERANGAN  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Memang benar orang tersebut diatas warga .....

Menerangkan :

1. Bahwa yang bersangkutan adalah suami/istri...
2. Bahwa yang bersangkutan saat ini masih warga .....
3. dst

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pacitan,

Ketua RT

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP/Nomor Identitas :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan/pekerjaan :  
Unit Kerja :  
Tanggal lahir :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- 1.
- 2.
3. dstnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

..... tanggal, .....

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan

.....